

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
BELANJA DAERAH KOTA BATAM PERIODE
2010-2014**

SKRIPSI



Oleh
Nur Ainun Sinaga
120810208

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
BELANJA DAERAH KOTA BATAM PERIODE
2010-2014**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Nur Ainun Sinaga
120810208**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 17 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

Nur Ainun Sinaga

120810208

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
BELANJA DAERAH KOTA BATAM PERIODE
2010-2014**

**Oleh:
Nur Ainun Sinaga
120810208**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti yang tertera di bawah ini**

Batam, 24 Maret 2017

**Hardi Bahar, S.E., M.Si
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa adanya pengaruh yang parsial dan simultan dari variabel Dana Alokasi Umum (X_1) dan dana alokasi Khusus terhadap belanja daerah pada pemerintah Cabang Batam center dikota Batam. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 Laporan Keuangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya koefisien regresi yang nantinya akan menunjukkan besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y). Dengan dana alokasi umum (X_1) berpengaruh terhadap belanja daerah dengan $t_{hitung} -2,905 > t_{tabel} 2,0047$ dengan tingkat signifikansi $0,00 \leq 0,05$ dan dana alokasi khusus (X_2) tidak berpengaruh signifikan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan $0,259 \geq 0,05$. Hasil uji F menunjukkan bahwa dana alokasi umum (X_1) dan dana alokasi khusus (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah (Y) dengan $F_{hitung} 4,305 > F_{tabel} 3,16$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Nilai R Square menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan dana alokasi umum mampu menjelaskan varians variabel alokasi belanja daerah sebesar 79 % sedangkan sisanya sebanyak 21 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Belanja Daerah

ABSTRACT

This study aims to prove the existence of partial and simultaneous influence of variables General Alokasih Fund (X1) and Special Allocation Fund towards expenditure on the local government center of Batam Batam Branch. The number of samples in this study was 60 of Financial Statements. The analysis used in this research is multiple linear regression which has the aim to determine the magnitude of the regression coefficients which will show the level of influence of independent variables on the dependent variabel The results of the t test showed that the variables of general allocation funds (X1) significantly affects the shopping area (Y). With the general allocation fund (X1) affect the shopping area with thitung $-2.905 > t_{tabel} 2.0047$ with 0.00 significance level ≤ 0.05 and special allocation funds (X2) had no significant effect with $t_{count} < t_{tabel}$ with a significant level ≥ 0.259 0.05 . F test results showed that the general allocation fund (X1) and special allocation funds (X2) effect simultaneous to the shopping area (Y) with $F_{hitung} 4.305 > 3.16$ F_{table} with a significant level of $0.000 < 0.05$. Rated R Square shows that the variable of local taxes and general allocation fund is able to explain the variance of the variable allocation of regional spending by 79% while the remaining 21% is explained by other variables not included in this research model.

Keywords: General Allocation Fund and Special Allocation Fund Shopping Area

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kasih dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.
3. Hardi Bahar, S.E., M.Si selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
5. Orang tua tercinta, Kakak ku Aisyah Sinaga dan abangku Anwar Siddik sinaga dan adek ku Nita Karlina Sinaga, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, serta doa kepada penulis.
6. Sahabat-sahabatku, Ka wahyu, ka ros manullang, Ka uli nasifa, dan teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan tahun 2012 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan berkatNya. Amin.

Batam, 23 Maret 2017

Nur Ainun Sinaga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Perumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1 Aspek Teoritis.....	7
1.6.1 Aspek Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar.....	9
2.1.1 Pendapatan Daerah	10
2.1.2 Dana Alokasi Umum.....	12
2.1.1 Penerepan Pengalokasian.....	15
2.1.2 Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum.....	15
2.1.3 Pelaporan Pengguna Dana Alokasi Umum (DAU).....	15
2.1.4 Dana Alokasi Umum (Dau) Dalam Masalah Peralihan	15
2.1.2 Dana Alokasi Khusus.....	16
2.1.2.1 Menetapkan Kegiatan Khusus.....	16
2.1.2.2 Penghitungan Dana Alokasi Khusus.....	17
2.1.2.3 Penetapan Dan Pengguna Dana Alokasi Khusus.....	17
2.1.2.4 Dana Pendamping	18
2.1.2.5 Bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).....	19
2.1.2.6 Dana Rebasasi.....	20
2.1.3.1 Belanja Daerah.....	21
2.1.3.1 Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib Urusan Pilihan Dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara.....	22
2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi.....	24
2.1.3.3 Kelompok Belanja Daerah Kota Batam.....	25

2.1.3.4	Belanja Operasi.....	25
2.1.3.5	Belanja Modal.....	29
2.1.3.6	Belanja Tidak Terduga.....	30
2.2	Penelitian Terdahulu.....	30
2.3	Kerangka Pemikiran.....	37
2.4	Hipotesis.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Desain Penelitian.....	42
3.2	Operasional Variabel.....	42
3.2.1	Variabel Bebas (Independent Variabel).....	42
3.3	Operasional Variabel.....	43
3.3.1.1	Dana Alokasi Umum (DAU).....	43
3.3.1.2	Dana Alokasi Khusus (DAK).....	43
3.2.2	Variabel Terikat (Dependen Variabel).....	44
3.3.2.1	Belanja Daerah.....	44
3.4	Populasi dan Sampel.....	46
3.4.1	Populasi.....	46
3.4.2	Sampel.....	46
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5.1	Alat Pengumpulan Data.....	47
3.6	Metode Analisis Data.....	49
3.6.1	Analisis Deskriptif.....	49
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	50
3.6.2.1	Uji Normalitas.....	50
3.6.2.2	Uji Multikolinieritas.....	51
3.6.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	52
3.6.2.4	Uji Autokorelasi.....	53
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	53
3.6.4	Uji Hipotesis.....	54
3.6.3.1	Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T).....	55
3.6.3.2	Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F).....	56
3.6.3.3	Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	57
3.7	Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	57
3.7.1	Lokasi Penelitian.....	58
3.7.2	Jadwal Penelitian.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	59
4.1.1	Analisis Deskriptif.....	59
4.1.2	Uji Asumsi Klasik.....	60
4.1.2.1	Uji Uji Normalitas.....	60
4.1.2.2	Uji Multikolinieritas.....	63
4.1.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	65
4.1.2.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	66
4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	67

4.2.4.	Hasil Uji Hipotesis.....	69
4.2.4.1	Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (t).....	70
4.1.4.2	Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (f).....	71
4.2.5	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	73
4.3	Pembahasan.....	74
4.3.1	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah.....	74
4.3.2	Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X2) Terhadap Belanja Daerah.....	75
4.3.	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Secara Bersama-sama Terhadap Belanja Daerah	76

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan.....	78
5.2	Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	57
Tabel 3.2	Analisis Deskriptif.....	59
Tabel 3.3	Kolmogorov-Smirnov	63
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	65
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi.....	67
Tabel 4.7	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	68
Tabel 4.8	Hasil Uji Parsial (Uji T)	70
Tabel 4.9	Hasil Uji Simultan (Uji F)	72
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	37
Gambar 4.1 Histogram	57
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas – <i>Normal Probability Plots</i>	62
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas – <i>Scatter Plot</i>	65

DAFTAR GAMBAR

- Lampiran I Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 20
Lampiran II Tabel T
Lampiran III Tabel F
Lampiran IV Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 2010-2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nur Ainun Sinaga
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Tembesi Towor RT 01 / RW 16.
Tempat/tanggal lahir : Kolang 11 April 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Pendidikan Formal

2000 – 2006 : SDN 1 Kolang
2006 – 2009 : SMPN 1 Kolang
2009 – 2012 : SMAN 1 Kolang
2012 – 2017 : Universitas Putera Batam (Prodi Akutansi)

Riwayat Pekerjaan

2017 – Sekarang : VMC PT. Rapala
Jabatan : Operator
2015 – 2016 : PT. Kembang Utama
Jabatan : Admin Accounting
2012 - 2015 : Villa Kreasi Bangsa Indonesia
Jabatan : Admin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran daerah atau lebih dikenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Mulyawan 2010).

APBD merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisinya atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur jalan akan mendorong perkembangan kegiatan sektor-sektor yang menggunakan jalan tersebut (sektor perdagangan, pertanian, industri, transportasi,

dan lainnya) serta berpengaruh terhadap perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang selanjutnya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2011 : 3)

Kota Batam merupakan daerah otonomi yang berarti kota Batam memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri disegala bidang dengan seminimal mungkin campur tangan dari pemerintah pusat namun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut di atur UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini membawa perubahan signifikan pada sistem dan mekanisme pengelolaan daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentrasfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang- undang No 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang N. 33 tahun 204 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, sumber- sumber penerimaan terdiri atas Pendapatan asli daerah yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lainnya dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAU). Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerimaan pendapatan dan anggaran daerah mempunyai kaitan

yang erat terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah (Adisasmita 2011).

Dana Alokasi Umum Adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan kepada Daerah dalam bentuk *blok Grani* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah (Adisasmita 2011).

Lahirnya Otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah, untuk itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kebijakan diarahkan pada penerapan prinsi-prinsip, norma, asas, dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan peneliti di bidang keuangan pada pemerintah menjadi relevan dan penting.

Pesatnya pembangunan yang menyangkut kegiatan fiskal dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan persediaan dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah di laporkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang merupakan kegiatan yang rutin pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dalam APBD dapat bahwa pendapatn yang di peroleh daerah digunakan untuk membiayai belanja

daerah. Pendapatan sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah) dan dana transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari dana bagi hasil, Dana alokasi umum, dan Dana alokasi khusus).

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan daerah. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan sumber-sumber PAD terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah (Mulyawan 2010).

Menurut Adisasmita, (2011) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grani* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana yang berasal dari APBN untuk di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah DAK yaitu Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik. Oleh sebab itu dalam penelitian DAK tidak digunakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi Belanja Modal. DAU bersifat hibah umum oleh karenanya pemda-pemda memiliki kebebasan dalam pemanfaatannya tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai” PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA BATAM PERIODE 2010-2014”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dana Alokasi Umum yang dianggarkan untuk daerah masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat seperti operasional daerah dalam pembangunan

fasilitas masyarakat misalnya jalan, gedung, pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat belum merasakan manfaatnya.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan penelitian pada hal dibawah ini :

1. Objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam
2. Variabel yang diteliti adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel bebas, dan variabel Belanja Daerah sebagai variabel terikat.
3. Laporan yang diteliti adalah data tahun 2010-2014.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan yang ada diatas maka penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
2. Bagaimana Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah ?
3. Bagaimana Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Alokasi Belanja Daerah ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Belanja Daerah di Kota Batam serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk kegiatan penelitian.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi pemerintah daerah kota Batam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Karena secara tidak langsung akan meningkatkan Belanja daerah, sehingga dapat digunakan perekonomian daerah.

2. Bagi Masyarakat
3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi khususnya dibidang Akuntansi dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian serupa pada periode dimasa yang akan datang.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu media untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama kegiatan perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah Nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah), pendapatan daerah bersal dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah srta lain-lain pendapatan yang sah. Semua penerima keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan suatu daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerima keuagan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah yaitu
Pungutan daerah menurut peraturan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
2. Hasil retribusi daerah yaitu
Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antardaerah. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

DAU dapat didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Nordriawan dkk, 2010).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan daerah dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisi antar kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi Dana Umum (DAU) bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensinya fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) relatif (Kuncoro, 2014)

Jumlah Seluruh DAU dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan daerah dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisi antar kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi Dana Umum (DAU) bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensinya fiskalnya kecil

namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) relatif.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Agus Budi Santosa)

2.1.1 Penerapan Pengalokasian

Secara definisi, dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Nordiawan Dedi, dkk 2008:56). DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten / kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Neto
2. Proporsi DAU antar provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota
3. Jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif proporsi DAU antar provinsi dan kabupaten / kota ditetapkan dengan imbang 10 % dan 90 %.

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Dan kapasitas fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Formula penghitung DAU adalah :

$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$	Rumus 2.1 Perhitungan DAU
--	--

Dimana,

$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$

Sumber : (Nordiawan dkk, 2008)

Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendapatan daerah ntuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (antara lain kesehatan, pendidikan infrastruktur, an pengetasan kemiskinan). Setiap kebutuhan pendapatan tersebut diukur secara berturut turut menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wiliyah indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB, dan IPM, sedangkan kapasitas fiskal daerah dihitung berdasarkan Pendapatan Asli daerah dan Dana Bagi Hasil (Nordiawan dkk, 2008)

Sementara DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antar celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh kabupaten / kota.

Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, kapita, sedangkan kapasitas iskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli daerah dan DBH.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar DUA sebesar alokasi dasar setelah di perhitungkan nilai celah fiskal. Dan daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif tetap nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

2.1.2 Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)

Hasil perhitungan dana alokasi umum untuk masing-masing daerah di tetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan dewan pertimbangan otonomi.

Usulan dewan pertimbangan otonomi daerah setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk memperhitungkan dari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah.

Usulan dewan alokasi umum untuk masing – masing daerah di sampaikan oleh dewan pertimbangan otonomi daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum

(DAU) kepada masing-masing kas daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala.

2.1.3 Pelaporan Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Gubernur melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku kepada Bupati/Walikota dengan tambahan berupa tembusan pada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah (Adisasmita, 2011)

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Masa Peralihan

Dalam masa pemeliharaan dengan berlakunya PP No. 104 Tahun 2000, pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai ke daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) ini dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai Pemerintah pusat maupun yang diahlikan menjadi pegawai daerah. Dalam hal pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk diahlikan kepada daerah belum sepenuhnya menjadi beban daerah, membayar gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang bersangkutan. Jangka waktu masa peralihan adalah sampai dengan semua pegawai pemerintah pusat yang telah

diterapkan untuk dialihkan kepada daerah telah sepenuhnya menjadi beban daerah yang bersangkutan.

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

Menurut Adisasmita (2010) Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program/kegiatan yang tidak dapat didaerah lain. Kegiatan/program yang dibiayai dengan DAK harus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang mendapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan, Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

2.1.2.1 Menetapkan Kegiatan Khusus

Kegiatan khusus yang akan dilandai dari DAK diusulkan oleh Menteri Teknis dan baru ditetapkan setelah berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai

dengan Rencana Pemerintah. Keputusan tentang kegiatan khusus tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan.

2.1.2.2 Penghitungan Dana Alokasi Khusus

Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK, yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Daerah tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing – masing daerah, yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum adalah perumusan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal neto, dan daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur menyelenggarakan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan indeks wilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/ pimpinan lembaga terkait. Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator–indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis tersebut dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

2.1.2.3 Penetapan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penggunaan DAK harus dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang dikeluarkan oleh Menteri teknis. DAK tidak digunakan untuk menandai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas (Nordiawan 2008).

Ada beberapa kewajiban yang melekat pada daerah penerima DAK, yaitu

- a. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK nya di dalam APBD
- b. Kecuali untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu, daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang – kurangnya 10 % dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
- c. Kepala daerah penerima DAK harus menyampaikan laporan triwulan yang membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan dilakukan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir

2.1.2.4 Dana Pendamping

Daerah yang Mendapatkan dana yang bersumber dana pendamping yang bersumber dari APBN sesuai kemampuan daerah yang bersangkutan. UU No. 25/

1999 pasal 8 menggariskan bahwa kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dibiayai dengan DAK antara lain kebutuhan yang tidak dapat di pikirkan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan atau kebutuhan yang merupaka komitmen atau probiritas nasional. 40 % dari penerimaan negara yang bersal dari Dana Reboisasi disediakan kepada daerah sebagai DAK. DAK diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang menyediakan dana pendamping 10 % yang berasal dari penerimaan umum APBD (kecuali untuk DAK Reboisasi).

2.1.2.5 Bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK ditunjuk untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu DAK sering disebut *specificgrants*. Alokasi DAK yang distribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus (Mudrajad Kuncoro 2014)

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum misalnya:

- a. Kebutuhan prasana dan sarana fisik dari daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai kedaerah lain.
- b. Kebutuhan prasana dan fisik daerah yang menampung transmigrasi
- c. Kebutuhan prasana dan fisik yang terletak di daerah pesisir / kepulauan yang tidak mempunyai prasana dan sarana yang memadai
- d. Kebutuhan prasana dan fisik di daerah guna megatasi dampak kerusakan lingkungan.

2. Kebutuhan yang merupakan kimitmen atau prioritas nasional

- a. Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi komitmen pemerintah dengan lembaga donor
- b. Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Rancangan Pembangunan Tahun.

2.1.2.6 Dana Reboisasi

Penerimaan negara yang berasal dari Dana Reboisasi sebesar 40 % disediakan kepada kepada daerah penghasil sebagai bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan dan penghijauan oleh daerah bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata bertanggung jawab, Kepada Daerah diberikan kewenangan dalam pengambuntuk mendayakan sumber – sumber keuangan keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan antara pusat dan daerah.

Kewenangan yang diberikan tersebut diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dalam pengambilan keputusan disektor pengeluaran (*Public Spending*). Dukungan sumber – sumber keuangan yang sudah ada di daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak, dan SDA, dan Dan Alokasi Khusus) serta pinjaman daerah.

Salah satu unsur dari dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dana yang bersal dari APBN dialokasikan kepada daerah untuk

membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai prioritas nasional (Adisasmita, 2010).

2.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih.

Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan di peroleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah (Nordiawan dkk, 2008).

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.1 Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara

Menurut Nordiawan Dkk (2008) yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, fasilitas, sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem sosial.

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan antara pertambangan, periklanan, pertanian, perkebunan perhutanan dan pariwisata (Nordiawan dkk, 2008)

Secara rinci klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan umum
- d. Perumahan rakyat
- e. Penataan ruang
- f. Perencanaan pembangunan
- g. Perhubungan, lingkungan hidup,
- h. Pertanahan,
- i. Kependudukan dan catatan sipil,
- j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- k. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- l. Sosial.
- m. Ketenagakerjaan,
- n. Koperasi dan usaha kecil dan menengah,
- o. Penanaman modal,
- p. Kebudayaan,
- q. Kepemudaan dan olahraga

r. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- a. Pertanian
- b. Pariwisata
- c. Energi dan sumber daya mineral
- d. Energi.
- e. Kelautan dan perikanan.
- f. Pedagangan.
- g. Perindustrian dan.
- h. Transmigrasi.

Klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan keuangan negara mencakup:

- a. Pelayanan umum.
- b. Ketertiban ketentraman.
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan hidup.
- e. Perumahan dan fasilitas umum.
- f. Kesehatan.
- g. Pariwisata dan budaya.
- h. Agama.
- i. Pendidikan.
- j. Perlindungan sosial

2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi

Nordiawan dkk, (2008) yang dimaksud dengan klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemda. Pembagian struktur belanja berdasarkan organisasi ini meliputi unsur pemerintah daerah yang terdiri atas DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.1.3.3 Kelompok Belanja Dalam Pemerintah

Belanja daerah menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

2. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Berdasarkan karakteristiknya, belanja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, belanja Modal, dan Belanja Tak terduga.

2.1.3.4 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

Dwi Ratmono dan Solihin (2015) belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang telah diperkerjakan oleh pemda yang belum bersatus, PNS sebagai imbalan atas pekerja yang telah dilaksanakan kecuali pekerja yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

b. Belanja barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang di pasarkan atau tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja barang dapat dibedakan menjadi :

1). Belanja Barang dan saja

Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, langganan daya lain dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat nonfisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemda dan pengeluaran jasa nonfisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian (Nordiawan dkk, 2008)

2). Belanja Pemeliharaan

Adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan, dan sarana gedung, jalan, jaringan, irigasi, peralatan mesin dan lain-lain serana berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Nordiawan dkk, (2008)

3). Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan pengeluaran dinas yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

c. Belanja Bunga

Dwi Ratmono dan Solihin (2015:33) belanja bunga adalah pengeluaran pemda untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok

utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMD dan perusahaan swasta. Jadi belanja subsidi adalah pengeluaran pemda yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat Nordiawan dkk (2008)

e. Hibah

Hibah adalah pengeluaran pemda dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemda orang lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus Nordiawan dkk (2008).

f. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga

kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Dwi dan Mahfud (2015).

g. Belanja bantuan keuangan

2.1.3.5 Belanja Modal

Ratmono dan Solihin (2015) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal termasuk :

- a. Belanja tanah.
- b. Belanja peralatan dan mesin.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
- e. Belanja aset tetap lainnya.
- f. Belanja aset lainnya.

2.1.3.6 Belanja Tidak terduga

Kelompok biaya lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat di perlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian ini diteliti oleh Yansen (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja daerah dengan jumlah sampai 15 kabupaten di wilayah Sumatera Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan korelasi untuk menguji hipotesis asosiatif. Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa DAU dan DAK di wilayah Sumatera Selatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun secara simultan keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
- 2) Rasidah dan Rizani (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh DAU, dan DAK pada belanja daerah dengan jumlah sampel 13 kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa PAD, DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
- 3) Nugraeni (2011) melakukan penelitian pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap belanja daerah tahun 2007-2009 studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, dengan jumlah sampel 295 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan alat analisis linier berganda,

yang mana dari penelitiannya menunjukkan hasil, bahwa DAU dan DAK berhubungan positif secara signifikan terhadap belanja daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

- 4) Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu DAU dan DAK signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Noni Puspita (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan DAK menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa DAK secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2009) menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Alokasi Umum (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, DAK secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1	Yansen (2013)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah	Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terdapat Belanja Daerah	pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja daerah dengan jumlah sampel 15 kabupaten di wilayah Sumatera Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan korelasi untuk menguji hipotesis asosiatif. Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa DAU dan DAK di wilayah Sumatera Selatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun secara

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
				simultan keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah
2	Harianto dan Adi (2007)	Pengaruh Pendapatan Asli (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal	PAD,DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal	Hasil penelitian oleh Adi (2006) dalam Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa proporsi DAU terhadap penerimaan daerah dalam beberapa tahun berjalan masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu membiayai

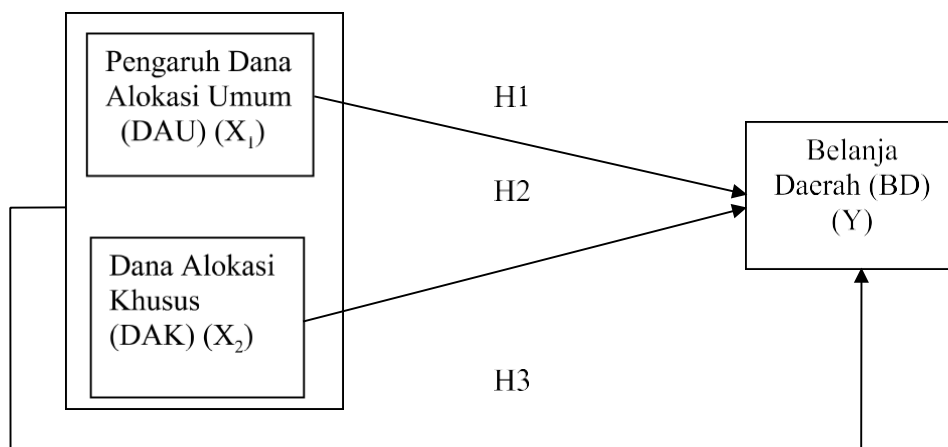
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
				seluruh pengeluarannya dengan dana/modal sendiri, atau dengan kata lain masih sangat tergantung pada sumber pembiayaan dari luar pemerintah daerah. Besarnya ketergantungan
3	Nugraeni (2011)	pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Daerah Tahun 2007-2009 studi kasus pada pemerintah	pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Daerah	pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap belanja daerah tahun 2007-2009 studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota
4	Bambang Prakosa (2004)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah.	DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan	DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu DAU dan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
			<p>DAK menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa DAK secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung</p>	<p>DAK signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Noni Puspita (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan DAK menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa DAK secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung.</p>
5	Puspita Sari 2009	DanaAlokasi Umum (DAU) Dan Alokasi Umum (DAK) Terhadap Belanja	DAU Dan Alokasi DAK Terhadap Belanja	Pengaruh DanaAlokasi Umum (DAU) Dan Alokasi Umum (DAK) Terhadap Belanja Langsung

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
		Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau		Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, DAK secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_1), dan Dana Alokasi Khusus (X_2), terhadap Belanja Daerah (Y).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara (berdasarkan penelitian) atas pertanyaan dalam masalah penelitian, yang akan di uji kebenarannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan secara teoritis diatas, maka penulis membuat hipotesis dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_1 : Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Belanja Daerah

H₂ : Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah

H₃ : Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian adalah pemikiran yang secara sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta (Rianse dan Abdi, 2012)

Desain penelitian merupakan suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Dalam rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan periset dimulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisis terakhir (Umar, 2010)

Penelitian ini menggunakan metode data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola pihak lain yang sudah dipublikasikan, misalnya Biro Pusat Statistik (Kuswanto, 2012)

3.2 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini ada dua jenis variabel penelitian antara lain: variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel independen adalah variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau m

enjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013: 39).

3.3 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini ada dua jenis variabel penelitian antara lain: variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel independen adalah variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau m enjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013).

3.3.1.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Adisasmita (2011) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuanagan daerah.

3.3.1.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Ikhlas 2011). DAK memainkan peran penting dalam

dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Ikhlas 2011).

3.3.2 Variabel Terikat (Dependen Variabel)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013).

3.3.2.1 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan.

Tabel 3.1. Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	DAU (X ₁)	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan amggran pendapatan dan belanja daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk <i>block grant</i> yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya.	Transfer dana pemerintah pusat	Nominal
2	DAK (X ₂)	Dana yang berasal dari APBN yang disalurkan kepada daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus daerah yang bersangkutan	Trasfer dari pemerintah, Dana Khusus	Nominal
3	Belanja Daerah (Y)	Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan utama pemerintah daerah.	Belanja Daerah	Nominal

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2013). Populasi dalam penelitian ini adalah Pengaruh dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di kota Batam. Periode waktu yang diambil adalah selama 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2010-2014.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti populasi tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil harus betul- betul *representatif* (mewakili). (Sugiono, 2012)

Penelitian ini dilakukan dengan metode sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu metode penetapan sampel dengan cara menentukan target elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya, artinya data yang diambil adalah data yang berhubungan penelitian yang dilakukan di Dinas pendapatan daerah Kota BATAM Periode 2010 – 2014.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data sekunder

Menurut Kuswanto (2012) data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola pihak lain yang sudah dipublikasikan, misalnya Biro Pusat Statistik.

2. Penelitian keperustakaan (*library research*)

Seprti yang kita ketahui perpustakaan adalah tempat penyimpanan berbagai macam buku yang sama ditulis oleh orang yang berbeda dan memiliki konsep pemikiran yang berbeda. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk membaca dan mempelajari beberapa sumber tertulis yang ada seperti buku, jurnal ilmiah yang berhaubungan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan konsep, aplikasi dan teori yang digunakan sumber rujukan dan pembanding skripsi yang dilakukan.

3.4.1 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dinas pendapat daerah.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola pihak yang sudah dipublikasikan (Kuswanto, 2010).

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan pada pemerintah Dispenda Batam center dikota Batam Periode 2010-2014.

b. Sumber Data

Sumber data dalam laporan ini diperoleh melalui Kantor Dispenda Batam sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan laporan keuangan tahunan Kantor Dispenda tahun 2010-2014 beserta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data yang lengkap dan aktual. Studi kepustakaan juga dilakukan penulis dengan cara membaca, mendalami, dan menelaah berbagai *literature, text books*, serta catatan kuliah yang menunjang penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang sifatnya teoritis dan digunakan sebagai perbandingan dalam pembahasan.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian kita (Martono, 2012).

Analisis data yang digunakan yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Analisis data bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang besarnya kekuatan variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Analisis data ini menggunakan alat bantu program SPSS versi 200

3.6.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, hitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentase.

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2010).

Menurut Priyatno (2010) analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian modus dan sebagainya. Juga dilakukan pengukuran *skewness* dan *kurtosis* untuk menggambarkan distribusi data apakah normal apakah tidak.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi digunakan untuk memeberikan pre-test, atau uji awal terhadap suatu perangkat atau instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, bentuk data dan jenis data yang akan diproses lebih lanjut dari suatu kumpulan data awal yang telah diperoleh, sehingga syarat untuk mendapatkan data yang tidak bisa menjadi terpenuhi atau, sehingga prinsip *Best Linier Unbiased Estimator* atau *BLUE* terpenuhi (Ghozali, 2016)

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng, *bell-shaped curve*.

Menurutnya uji ini dilakukan jika data memiliki skala ordinal, interval maupun rasio dan menggunakan metode parametrik dalam analisisnya. Jika data tidak berdistribusi normal dan jumlah sampel kecil kemudian jenis data nominal atau ordinal maka metode analisis yang paling sesuai adalah statistik non-parametrik.

Kedua sisi kurva melebar sama tidak terhingga. Suatu data dikatakan tidak normal jika memiliki nilai data yang ekstrim, atau biasanya jumlah data terlalu sedikit.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Histogram Regression Residual yang sudah distandarkan, analisis Chi square dan juga menggunakan Nilai Kolmogorov-Smirnov. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika : Nilai Kolmogorow – Smirnov $Z < Z_{\text{tabel}}$ atau menggunakan nilai Probability Sig (2 tailed) $> \alpha$; sig $> 0,05$ (Ghozali, 2016).

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Didalam persamaan regresi tidak boleh terjadi multikolinieritas, maksudnya tidak boleh ada kolerasi atau hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas yang membentuk persamaan tersebut. Jika pada model persamaan tersebut terjadi gejala multikolinieritas itu berarti sesama variabel bebasnya terjadi korelasi.

Suatu model dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 , angka ini dilihat pada tabel *Coefficient*.

Dapat juga menarik kesimpulan dengan cara melihat dalam tabel *Coefficient Correlation*, suatu model dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai kolerasi antara variabel independenya $< 0,5$.

Metode yang dapat digunakan adalah dengan mengkorelasikan antara variabel bebsanya, bila niali koefisien korelasi antara variabel tidak lebih besar dari 0,5 maka dapat ditarik kesimpulan model persamaan tersebut tidak mengandung multikolinearitas (Ghozali, 2016).

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Suatu model dikatakan memiliki problem heteroskedastisitas artinya terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian residual pada pengamatan model regresi tersebut.

Uji heteroskedastisitas akan digunakan uji *Park Gleyser* dengan cara mengkorelasikan nilai *absolute residualnya* dengan masing-masing variabel indpenden. Jika hasil nilai probabilitasnya memiliki nilai signifikansi $>$ nilai alpha-nya (0,05), maka model tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Imam Ghozali (2016) Uji Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam modal regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, cross section atau time-series. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan yang lain pada model. Beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Menurut Gujarati (1999) dalam Ghozali (2016) dapat diketahui dengan metode grafik, metode Durbin-Watson, metode runtest, dan uji statistik non parametrik.

Dalam pembahasan kali ini akan digunakan uji autokorelasi dengan menggunakan metode yang paling umum digunakan yaitu metode Durbin-Watson.

Ghozali (2016) mengatakan bahwa nilai kritis yang digunakan adalah default spss = 5%. Cara yang digunakan adalah dengan menilai tingkat profitabilitas, jika $> 0,05$, berarti tidak ada terjadi autokorelasi dan sebaliknya.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Ghozali (2016) Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana. Model analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya yaitu Dana Alokasi Umum (X_1), dan Dana Alokasi Khusus (X_2) berpengaruh terhadap belanja daerah (Y).

Analisis ini memiliki perbedaan dalam jumlah variabel independen yang merupakan variabel penjelas jumlahnya lebih dari satu buah. Variabel penjelas

yang lebih dari satu buah inilah yang kemudian akan dianalisis sebagai variabel-variabel yang memiliki hubungan-pengaruh, dengan, dan terhadap variabel yang dijelaskan atau variabel independen.

Dari hasil regresi yang diperoleh kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang diperoleh mempunyai pengaruh yang positif atau tidak, baik secara simultan maupun parsial dan mengetahui seberapa besar pengaruhnya (Ghozali, 2016).

3.5.4 Uji Hipotesis

Menurut Priyatno (2012) uji t koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05 dan 2 sisi. Kriteria pengujian adalah jika $t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan jika $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak. Kriteria untuk menentukan nilai t tabel dalam tabel statistik dengan taraf signifikan 0,05 dan 2 sisi dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$.

Penelitian ini merupakan proses memberi jawaban terhadap masalah yang dimunculkan, dengan analogi ini maka suatu penelitian mengharuskan keberadaan masalah. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi. Signifikansi artinya meyakinkan atau hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diperlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan berarti kesimpulan pada sampel tidak berlaku pada populasi (tidak dapat digeneralisasikan) atau hanya berlaku pada sampel saja. tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Artinya risiko salah

dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak 5% dan benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan).

3.6.3.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Menurut Priyatno (2010) Uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

1. Pengujian koefisien regresi variabel Dana Alokasi umum (X_1) terhadap Belanja Daerah (Y).

H_0 : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

H_1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

2. Pengujian koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y).

H_0 : Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

H_2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

S_{bi} = Standar error variabel i

Hasil uji t dapat dilihat pada output SPSS pada tabel *Coefficients* dari hasil analisis regresi linier berganda.

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan sebagai berikut:

1. H_0 diterima jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ atau signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima H_2 ditolak yang berarti bahwa masing-masing independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. H_0 ditolak jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak, H_2 diterima yang berarti bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.3.2 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Menurut Priyatno (2010) Uji F (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (struktur aktiva dan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
2. H_3 : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Hasil uji F dapat dilihat pada output SPSS pada tabel *ANOVA* dari hasil analisis regresi linier berganda.

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. H_0 diterima bila $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ atau signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima H_1 ditolak yang berarti bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

2. H_0 ditolak F hitung $> F$ tabel atau signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak H_a diterima yang berarti semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3.6.3.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

R square (R^2) atau kuadrat R, yaitu menunjukkan nilai koefisien determinasi yang artinya presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012). Secara singkat koefisien tersebut untuk mengukur besar sumbangan dari variabel x (bebas) terhadap keragaman variabel Y (terikat) (Ghozali, 2012).

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Batam. Data laporan keuangan realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di Kota Batam tahun 2010-2014.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang digunakan untuk kegiatan penelitian untuk penulisan skripsi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian

Nama	Sep-16	Okt-16	Nop-16	Des-16	Jan-17
------	--------	--------	--------	--------	--------

Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Penentuan judul	■	■	■	■																	
Pendahuluan Penelitian					■	■	■	■													
Tinjauan pustaka dan pengumpulan data									■	■	■	■									
Pelaksanaan penelitian													■	■	■	■					
Pengumpulan data																	■	■	■	■	